

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan tantangan fundamental dan permasalahan klasik dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional. Upaya penanggulangannya menjadi prioritas utama karena kemiskinan bukan hanya terkait keterbatasan pendapatan, tetapi juga berpengaruh pada rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara menyeluruh.

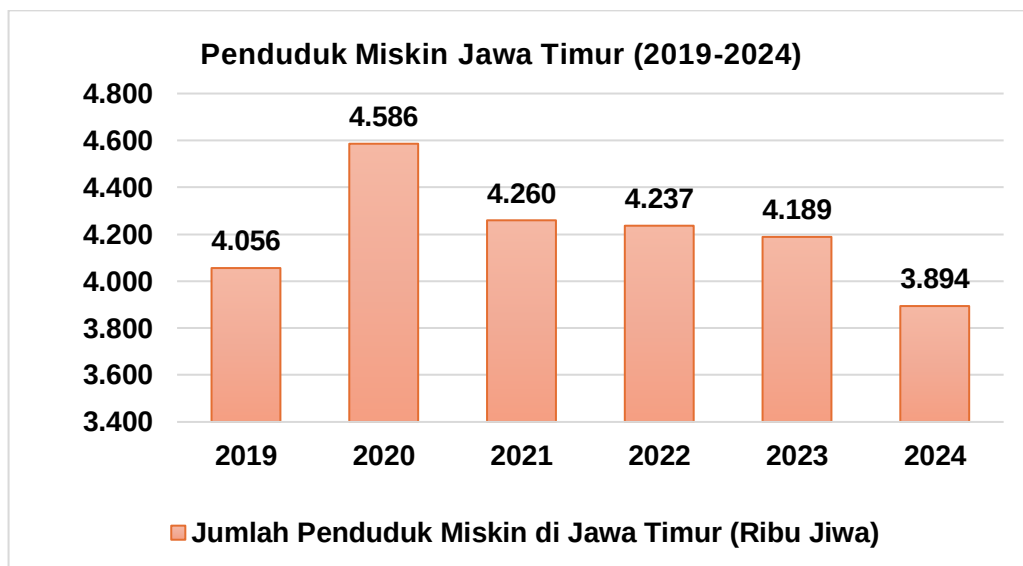
Kemiskinan dalam konteks akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai indikator *outcome* pembangunan daerah yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Melalui pengelolaan PAD, DAU, dan DAK yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian SDGs poin 1 yaitu *No Poverty*. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah melalui desentralisasi keuangan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah mendasar dalam pembangunan termasuk di wilayah Pulau Jawa yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin per provinsi, terlihat bahwa Jawa Tengah mencatat jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu 9,48 juta jiwa, disusul oleh Jawa Timur dengan 3,876 juta jiwa (BPS, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Pulau Jawa, meskipun secara ekonomi

provinsi ini memiliki peran penting sebagai salah satu pusat perekonomian nasional.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Berikut daftar gambar penduduk miskin di Jawa Timur pada periode 2019-2024.

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur (2019-2024)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur periode 2019–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 angka kemiskinan meningkat akibat pandemi COVID-19, kemudian menurun secara bertahap hingga tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan, permasalahan kemiskinan di Jawa Timur masih memerlukan perhatian pemerintah daerah.

Perkembangan jumlah penduduk miskin yang fluktuatif di Jawa Timur tidak lepas dari peran kebijakan fiskal daerah. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal (3) menjelaskan tentang Penanganan Fakir Miskin dan dalam aturannya menegaskan bahwa penanganan fakir miskin bertujuan untuk

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup, mengurangi jumlah fakir miskin, serta mendorong pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin (Undang-Undang Nomor 13, 2011).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan melalui kebijakan fiskalnya. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola keuangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan jika sumber pendapatan daerah salah satu instrumen utama didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Transfer ke Daerah (DAU, DAK dan DBH).

Dari sumber tersebut, penelitian ini dibatasi pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena ketiga variabel tersebut merupakan komponen utama desentralisasi fiskal yang diterima oleh seluruh pemerintah daerah dan berkaitan langsung dengan kapasitas fiskal daerah dalam menekan tingkat kemiskinan. Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu, PAD, DAU, dan DAK merupakan variabel yang paling sering digunakan dalam penelitian mengenai kemiskinan daerah sehingga dinilai paling representatif untuk dianalisis.

Variabel lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Dana Keistimewaan tidak dimasukkan karena bersifat lebih khusus dan tidak diterima secara merata oleh seluruh daerah. Sementara itu, variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi lebih menggambarkan kondisi makroekonomi daerah, sedangkan penelitian ini difokuskan pada aspek penerimaan fiskal daerah. Adapun variabel belanja daerah tidak digunakan

karena penelitian ini menitikberatkan pada sisi pendapatan daerah dibandingkan aspek pengeluaran daerah.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi asli seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD mencerminkan kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri sebagai wujud otonomi daerah. Semakin tinggi PAD, semakin besar potensi daerah menyediakan layanan publik dan program pengentasan kemiskinan.

Selain itu, pemerintah pusat menyalurkan dana melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Arina et al. (2019), DAU merupakan dana APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan antar daerah agar seluruh daerah dapat membiayai pelayanan publik secara merata. Semakin besar DAU yang diterima, semakin luas kemampuan daerah membiayai pelayanan publik dasar dan menekan kemiskinan.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana APBN yang diberikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020). DAK berperan dalam mendukung proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga dapat dijelaskan bahwa semakin besar DAK yang diterima, semakin optimal pula peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. (2023). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sinaga et al. (2023) terletak pada penggunaan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel independen, dan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini berbeda dari segi subjek, yakni fokus pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dan periode pengumpulan data, sehingga diharapkan memberikan pemahaman yang lebih relevan terhadap kondisi terkini di daerah tersebut.

Alasan peneliti meneliti kembali mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan disebabkan karena berdasarkan penelitian dari Sinaga et al. (2023) menunjukkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan tidak signifikan, bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan ketentuan teori desentralisasi fiskal yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui PAD, DAU dan DAK seharusnya dapat menekan angka kemiskinan.

Ketidaksesuaian hasil pada PAD dan DAK menunjukkan adanya masalah implementasi kebijakan fiskal di daerah, seperti distribusi yang tidak merata, alokasi yang tidak efektif, atau keterbatasan dalam pengelolaan dana daerah. Oleh karena itu, perbedaan antara hasil empiris dengan teori desentralisasi fiskal mendorong perlunya penelitian ulang dengan subjek dan periode data yang diperbarui, guna mengevaluasi kembali terkait efektivitas pengaruh PAD, DAU, dan DAK dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Tidak hanya itu, terjadinya beberapa perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya membuat peneliti juga ingin meneliti kembali pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian Nany et al. (2022) menunjukan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sejalan dengan

penelitian Rasu et al. (2019) dan Nur Izzati & Indrawati (2021). Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Hijrasil (2024) yang menemukan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian Sembiring et al. (2024) dan Sinaga et al. (2023) juga menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Nany et al. (2022) dan Hijrasil (2024) menemukan hasil sebaliknya. Begitu pula dengan DAK, di mana Sembiring et al. (2024) dan Suharto & Aini (2024) menyatakan DAK berpengaruh negatif signifikan, tetapi hasil berbeda diperoleh dari Nany et al. (2022) dan Hijrasil (2024) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada fakta bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi serta bervariasi antar daerah. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki struktur ekonomi yang beragam dengan perbedaan potensi PAD antar daerah, serta variasi besaran DAU dan DAK yang diterima, sehingga menarik untuk diteliti apakah ketiga variabel tersebut benar-benar mampu menekan tingkat kemiskinan secara konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap tingkat kemiskinan, sekaligus menguji kembali inkonsistensi hasil penelitian terdahulu pada konteks daerah yang berbeda.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis mengangkat judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Periode 2019-2024)**”.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Timur Periode 2019-2024?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Timur Periode 2019-2024?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Timur Periode 2019-2024?

1. 3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Timur Periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Timur Periode 2019-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Timur Periode 2019-2024.

1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai desentralisasi fiskal, khususnya terkait

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.